

ISSN 2089 - 998X  
KATALOG : 9302020.91

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT PENGELUARAN 2019 - 2023

Volume 9, 2024

<https://papuabarat.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA BARAT

<https://papuabarat.bps.go.id>

ISSN 2089 - 998X  
KATALOG : 9302020.91

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO**  
**PROVINSI PAPUA BARAT**  
**MENURUT PENGELUARAN**  
**2019 - 2023**

Volume 9, 2024

<https://papuabarat.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**PROVINSI PAPUA BARAT**

# **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN PROVINSI PAPUA BARAT 2019 - 2023 Volume 9, 2024**

Katalog BPS : 9302020.91  
ISSN : 2089 – 998x  
Nomor Publikasi : 91000.24007  
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm  
Jumlah Halaman : xii + 67 halaman

Penyusun Naskah:  
BPS Provinsi Papua Barat

Penyunting:  
BPS Provinsi Papua Barat

Pembuat Kover:  
BPS Provinsi Papua Barat

Penerbit:  
© BPS Provinsi Papua Barat

Dicetak Oleh : CV. Tintur Jaya

Sumber Ilustrasi:  
Freepik.com  
Canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat.

**Tim Penyusun**  
**Produk Domestik Regional Bruto**  
**Menurut Pengeluaran Provinsi Papua Barat 2019-2023**  
Volume 9,2024

Penanggung jawab umum : Ir. Merry, M.P.

Penanggung jawab teknis : Citra Yanuar Widayanti, SST, M.Stat.

Penyunting : Fitrah Sarah Ramadhani SST

Penulis : Harianto Palanu, S.Stat.

Pengolah Data : Harianto Palanu, S.Stat.

Pembuat desain cover : Harianto Palanu, S.Stat.

<https://papuabarat.bps.go.id>



# KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model - model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat peredaran uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.



Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Manokwari, April 2024  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
Provinsi Papua Barat,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Merry' with a checkmark-like flourish at the end.

**Ir. Merry, M.P.**





**Daftar Isi**  
**Produk Domestik Regional Bruto**  
**Menurut Pengeluaran Provinsi Papua Barat 2019-2023**  
 Volume 9, 2024

	Halaman
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto .....	3
1.2. Kegunaan Statistik PDRB .....	4
<b>BAB II    METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	9
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT .....	12
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah .....	14
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	16
2.5. Perubahan Inventori .....	20
2.6. Ekspor Impor.....	23
<b>BAB III    TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI PAPUA BARAT BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 - 2023 .....</b>	<b>27</b>
3.1. Tinjauan Agregat PDRB Papua Barat Menurut Pengeluaran .....	29
3.2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	34
3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT .....	39
3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah .....	39
3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	41
3.6. Perkembangan Perubahan Inventori .....	42
3.7. Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah .....	43
<b>BAB IV    PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 - 2023 .....</b>	<b>45</b>
4.1. PDRB (Nominal) .....	47
4.2. Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor .....	48

	<b>Halaman</b>
4.3. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	49
4.4. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB .....	49
4.5. Perbandingan Ekspor Barang dan Jasa terhadap PMTB .....	50
4.6. Perbandingan PDRB terhadap Impor Barang dan Jasa .....	50
4.7. Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan .....	51
4.8. Neraca Perdagangan ( <i>Trade Balance</i> ).....	52
4.9. <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> .....	52
BAB V PENUTUP .....	55
LAMPIRAN .....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	65

# DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Papua Barat Menurut Pengeluaran, 2019 - 2023 (miliar rupiah) .....	29
Tabel 3.1.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Papua Barat Menurut Pengeluaran, 2019 - 2023 (miliar rupiah) .....	30
Tabel 3.1.3 Distribusi PDRB ADHB Provinsi Papua Barat Menurut Pengeluaran, 2019 - 2023 (persen) .....	32
Tabel 3.1.4 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi Papua Barat Menurut Pengeluaran, 2019 - 2023 (persen) .....	32
Tabel 3.1.5 Indeks Implisit PDRB Provinsi Papua Barat Menurut Pengeluaran, 2019 - 2023 .....	33
Tabel 3.2.1 Perkembangan penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat, 2019 - 2023 .....	34
Tabel 3.2.2 Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat, 2019 - 2023 (persen) .....	36
Tabel 3.2.3 Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat, 2019 - 2023 (persen) .....	37
Tabel 3.2.4 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat, 2019 - 2023 (persen) .....	38
Tabel 3.3.1 Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Papua Barat, 2019 - 2023 .....	39
Tabel 3.4.1 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2019 - 2023 .....	40
Tabel 3.5.1 Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Papua Barat, 2019 - 2023	41
Tabel 3.6.1 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Papua Barat, 2019 - 2023 .....	43
Tabel 3.7.1 Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Antar Daerah Provinsi Papua Barat, 2019—2023.....	43
Tabel 4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Papua Barat, 2019 - 2023 .....	47
Tabel 4.2.1 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2019 - 2023 .....	48
Tabel 4.3.1 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2019 - 2023	49

**Halaman**

Tabel 4.4.1	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Papua Barat, 2019 - 2023 .....	50
Tabel 4.5.1	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2019 - 2023 .....	50
Tabel 4.6.1	Rasio PDRB terhadap Impor Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat, 2019-2023.....	51
Tabel 4.7.1	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Papua Barat, 2019-2023.....	51
Tabel 4.8.1	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat, 2019-2023.....	52
Tabel 4.9.1	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Provinsi Papua Barat, 2019-2023....	53

<https://papuabarat.bps.go.id>

# DAFTAR GAMBAR

## Halaman

Gambar 3.1.1 Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Provinsi Papua Barat Menurut Pengeluaran, 2019 – 2023 (miliar rupiah) ....	31
--	----

<https://papuabarat.bps.go.id>





<https://papuabarat.bps.go.id>

# BAB I PENDAHULUAN





## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

#### **a. Menurut Pendekatan Produksi**

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
2. Pertambangan dan Penggalian,
3. Industri Pengolahan,
4. Pengadaan Listrik dan Gas,
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
6. Konstruksi,
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
8. Transportasi dan Pergudangan,
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
10. Informasi dan Komunikasi,
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat,
13. Jasa Perusahaan,
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
15. Jasa Pendidikan,
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,
17. Jasa lainnya.

Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

## **b. Menurut Pendekatan Pendapatan**

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

## **c. Menurut Pendekatan Pengeluaran**

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

## **1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB**

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sekto-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.

4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://papuabarat.bps.go.id>



# BAB II

# METODE ESTIMASI

# DAN SUMBER DATA





## 2. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

### 2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

#### i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

#### ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

#### iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations) sebagai berikut :

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkoba
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut :

1. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

2. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
3. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
4. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

1. Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
2. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
3. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
4. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.



#### iv. Penghitungan PKRT Tahunan

##### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- b. Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- c. Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- d. Indeks Harga Konsumen (IHK).

##### 2. Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (adjustment). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (adjustment) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflasikan PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010. Untuk lebih jelasnya, langkah—langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut :

- a. Estimasi PKRT hasil Susenas :
  - Makanan = Pengeluaran Konsumsi Perkapita Seminggu x (30/7) x 12 x Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun
  - Bukan Makanan = Pengeluaran Konsumsi Perkapita Sebulan x 12 x Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun
- b. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu; Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
- c. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP

- d. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
- e. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
- f. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

## 2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

### i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### ii. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga. Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- a. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- b. pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- c. setiap anggota mempunyai tanggung Papuab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- d. kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- e. istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/ beasiswa.

### iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

### iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

#### 1. Sumber Data

- a. Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP)

Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

- b. Hasil *up-dating* direktori LNPRT.

Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

- c. Indeks Harga Konsumen (IHK)

#### 2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

- $\bar{x}_{ij}$  : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
- $x_{ij}$  : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
- $n_i$  : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga
- $i$  : Jenis lembaga LNPRT,  $i = 1, 2, 3, \dots, 7$
- $j$  : jenis pengeluaran LNPRT,  $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

b. Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

$X$  : PK-LNPRT adh Berlaku

$N_i$  : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflasikan PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

## 2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

### i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

## ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

## iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

## iv. Penghitungan PDRB Tahunan

### a. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)

- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

b. Metode Penghitungan

- **PK-P Provinsi adh Berlaku**

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar ), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

- **PK-P Provinsi adh Konstan**

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

## 2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

### i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama dalam perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB erat kaitannya dengan aset tetap yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

## ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

## iii. Cakupan

**PMTB terdiri dari :**

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

## iv. Penghitungan PMTB Tahunan

### a. Sumber data

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/ Kab/Kota.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).

- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

#### b. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

- Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.



- Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*Commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-deflasi PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikasikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “reflate” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap. Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-deflasi PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan diperoleh dengan men-deflasi nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan.

Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB *adh Ber laku* diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk *adh Konstan* diperoleh dengan *men-deflate* nilai *adh Ber laku* dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB *adh Konstan* diperoleh dengan cara mendeflasikan nilai *adh Ber laku* dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (*arus komoditas*), yaitu:

- Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.

Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

## 2.5 PERUBAHAN INVENTORI

### i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

### ii. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

### iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
2. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
3. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
4. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
6. Ternak untuk tujuan dipotong;
7. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
8. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

#### iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

##### a. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

##### b. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

##### Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflasikan stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflasikan perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

## **Pendekatan Tidak Langsung**

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflasikan nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

## **2.6 EKSPOR IMPOR**

### **i. Pendahuluan**

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

### **ii Konsep dan definisi**

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

### iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

#### c. Net Ekspor antar daerah

- Ekspor antar daerah
- Impor antar daerah

### iv. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

#### a. Sumber data

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

#### b. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang.

Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*).

Selain ekspor-impor luar negeri, PDB/PDRB menurut Pengeluaran juga mencatat ekspor-impor yang dilakukan antar wilayah dalam negeri.

Ekspor dikurangi impor antar wilayah (antar provinsi) menghasilkan net ekspor antar wilayah. Bila net ekspor memiliki nilai positif, dapat dimaknai bahwa provinsi tersebut mengalami surplus perdagangan antar wilayah. Sebaliknya, bila net ekspor memiliki nilai negatif, dimaknai bahwa provinsi tersebut mengalami defisit perdagangan antar wilayah.

<https://papuabarat.bps.go.id>





# **BAB III**

## **TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI PAPUA BARAT BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2019-2023**





### 3. TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI PAPUA BARAT BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2019 - 2023

Perubahan struktur ekonomi Provinsi Papua Barat akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2019 - 2023, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Papua Barat digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

#### 3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB PAPUA BARAT MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Papua Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama sejak masuknya produsen LNG. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

**Tabel 3.1.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Papua Barat menurut Pengeluaran, 2019-2023 (miliar rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	24.567,13	24.656,13	26.052,28	27.794,79	13.050,04
2. Konsumsi LNPRT	882,99	843,34	836,21	894,82	582,61
3. Konsumsi Pemerintah	17.256,06	16.704,53	16.223,26	16.619,29	10.383,85
4. PMTB	18.366,13	18.219,84	18.895,97	17.576,12	8.932,08
5. Perubahan Inventori	911,12	-294,57	-1.184,15	-1.529,49	762,14
6. Ekspor Barang dan Jasa	50.328,16	44.197,30	42.594,14	53.179,43	55.838,84
7. Impor Barang dan Jasa	27.954,62	20.737,94	18.339,23	23.242,96	27.978,18
<b>Total PDRB</b>	<b>84.356,97</b>	<b>83.588,64</b>	<b>85.078,49</b>	<b>91.292,02</b>	<b>61.571,37</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Nilai PDRB Papua Barat (atas dasar harga berlaku) selama periode tahun 2019-2022 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, kecuali di tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, Provinsi Papua Barat mengalami pemekaran dan memiliki komposisi tujuh Kabupaten saja, sehingga terjadi penurunan dari segi total PDRB.

Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2019-2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Papua Barat berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 3.1.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Papua Barat Menurut Peluaran, 2019 - 2023 (miliar rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	16.826,38	16.639,20	17.087,31	17.709,23	8.470,24
2. Konsumsi LNPRT	592,40	546,31	529,82	547,44	339,93
3. Konsumsi Pemerintah	9.715,19	9.267,16	8.904,69	9.003,96	5.743,29
4. PMTB	11.816,23	11.302,85	11.223,39	10.256,51	5.339,82
5. Perubahan Inventori	762,03	-250,54	-1.393,34	-421,27	589,51
6. Ekspor Barang dan Jasa	47.314,46	45.934,78	41.019,72	38.684,23	39.456,61
7. Impor Barang dan Jasa	24.952,18	21.835,64	16.082,19	13.261,57	18.984,54
<b>Total PDRB</b>	<b>62.074,52</b>	<b>61.604,13</b>	<b>61.289,40</b>	<b>62.518,53</b>	<b>40.954,86</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

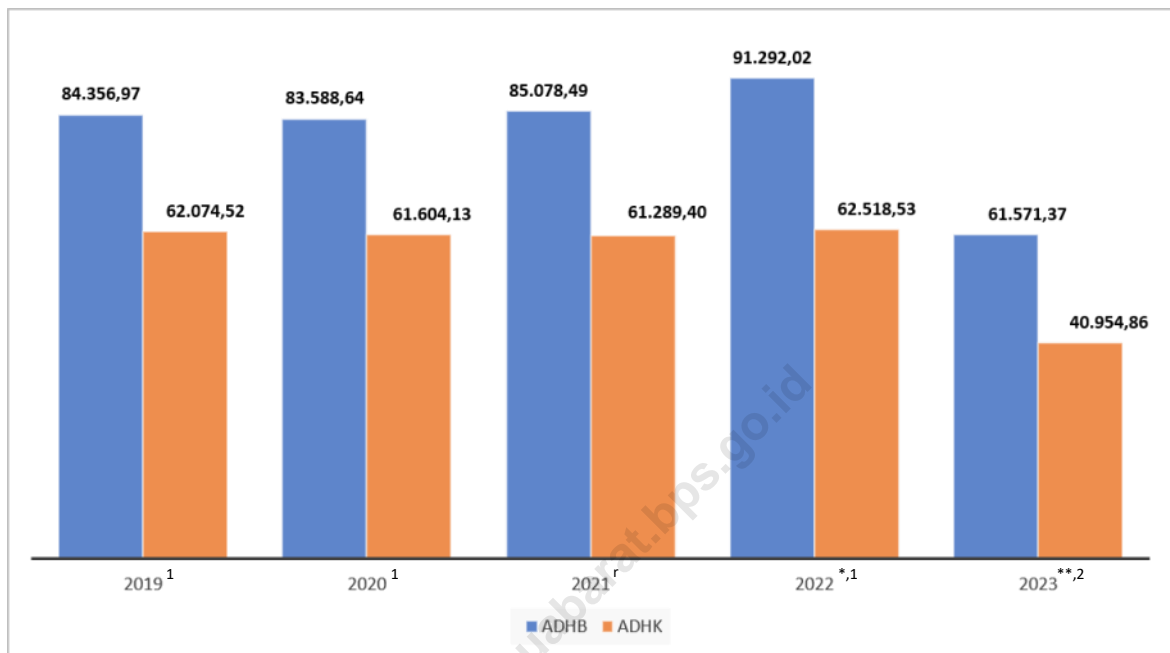
1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Dalam 5 tahun terakhir, PDRB adh Konstan pada umumnya juga menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 2020 dan 2021 ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan menahan kinerja perekonomian. Pada tahun 2023, terdapat perubahan komposisi wilayah di Provinsi Papua Barat akibat adanya pemekaran. Provinsi Papua Barat yang sebelumnya terdiri dari 13 kabupaten/kota, di akhir tahun 2022 resmi terdiri dari 7 kabupaten saja. Dengan demikian, nilai PDRB adh Konstan di tahun 2023 hanya mencapai 40.954,86 miliar Rupiah.

Selanjutnya, dari Gambar 1 terlihat bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku cenderung lebih besar daripada nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

**Gambar 3.1.1 Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Provinsi Papua Barat Menurut Pengeluaran, 2019 – 2023 (miliar rupiah)**



Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto atau ekspor dikurangi impor.

Bila dibandingkan, jarak antara PDRB ADHB dan ADHK memiliki kecenderungan untuk makin melebar dari tahun ke tahun. Hal ini dapat mengindikasikan perubahan harga yang terjadi dari tahun ke tahun untuk PDRB di Provinsi Papua Barat cenderung berupa inflasi atau kenaikan harga.

Analisis perekonomian juga dapat terlihat melalui distribusi PDRB suatu wilayah. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan komponen apa yang menjadi pilar ekonomi dan menggerakkan perekonomian di suatu wilayah. Semakin besar distribusi suatu komponen pengeluaran, semakin besar juga perannya dalam perekonomian wilayah tersebut.

**Tabel 3.1.3 Distribusi PDRB ADHB Provinsi Papua Barat Menurut Pengeluaran, 2019—2023 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	29,12	29,50	30,62	30,45	21,19
2. Konsumsi LNPRT	1,05	1,01	0,98	0,98	0,95
3. Konsumsi Pemerintah	20,46	19,98	19,07	18,20	16,86
4. PMTB	21,77	21,80	22,21	19,25	14,51
5. Perubahan Inventori	1,08	-0,35	-1,39	-1,68	1,24
6. Ekspor Barang dan Jasa	59,66	52,87	50,06	58,25	90,69
7. Impor Barang dan Jasa	33,14	24,81	21,56	25,46	45,44
<b>Total PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa selama periode 2019 – 2022, komponen ekspor memiliki peran paling besar dalam PDRB Papua Barat. Pada tahun 2023, Provinsi Papua Barat mengalami pemecahan wilayah dan terlihat bahwa pada cakupan wilayah yang baru, peran ekspor semakin dominan dibandingkan dengan komponen lainnya, mencapai 90 persen terhadap PDRB. Komponen ekspor Provinsi Papua Barat didominasi oleh ekspor migas.

Selanjutnya, proporsi konsumsi akhir rumah tangga juga cukup besar yaitu sekitar 29 – 30 persen pada tahun 2019-2022. Kemudian dalam periode yang sama, proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 18 hingga 20 persen. Pengeluaran untuk kapital (PMTB) mempunyai kontribusi sekitar 19 hingga 22 persen. Pasca pemecahan provinsi baru di tahun 2023, peranan komponen-komponen ini menurun seiring meningkatnya dominasi ekspor terhadap PDRB.

**Tabel 3.1.4 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi Papua Barat Menurut Pengeluaran, 2019—2023 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,81	-1,11	2,69	3,64	2,68
2. Konsumsi LNPRT	10,37	-7,78	-3,02	3,32	9,09
3. Konsumsi Pemerintah	3,42	-4,61	-3,91	1,11	13,88
4. PMTB	6,13	-4,34	-0,70	-8,61	-15,04
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	-4,39	-2,92	-10,70	-5,69	10,71
7. Impor Barang dan Jasa	-6,91	-12,49	-26,35	-17,54	14,68
<b>Total PDRB</b>	<b>2,66</b>	<b>-0,76</b>	<b>-0,51</b>	<b>2,01</b>	<b>5,18</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth). Indikator ini menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat dari tahun 2019 - 2022 cenderung mengalami sedikit fluktuasi, dengan masing-masing pertumbuhan 2,66 persen (2019); -0,76 persen (2020); -0,51 persen (2021); dan 2,01 persen (2022). Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat mencapai 5,18 persen.

**Tabel 3.1.5 Indeks Implisit PDRB Provinsi Papua Barat Menurut Pengeluaran, 2019– 2023**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	146,00	148,18	152,47	156,95	154,07
2. Konsumsi LNPRT	149,05	154,37	157,83	163,46	171,39
3. Konsumsi Pemerintah	177,62	180,26	182,19	184,58	180,80
4. PMTB	155,43	161,20	168,36	171,37	167,27
5. Perubahan Inventori	119,56	117,57	84,99	363,07	129,28
6. Ekspor Barang dan Jasa	106,37	96,22	103,84	137,47	141,52
7. Impor Barang dan Jasa	112,03	94,97	114,03	175,27	147,37
<b>Total PDRB</b>	<b>135,90</b>	<b>135,69</b>	<b>138,81</b>	<b>146,02</b>	<b>150,34</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) dibandingkan dengan tahun dasar (tahun 2010). Indeks implisit dari hampir seluruh komponen pembentuk PDRB menurut Pengeluaran Papua Barat menunjukkan terdapat peningkatan harga dari tahun ke tahun (ditunjukkan oleh nilai indeks lebih dari 100).

Indeks implisit konsumsi akhir rumah tangga pada umumnya selalu meningkat setiap tahun mengikuti inflasi di Provinsi Papua Barat, kecuali pada tahun 2023. Turunnya indeks implisit pada komponen tersebut diduga menunjukkan tingkat harga barang yang dikonsumsi rumah tangga berangsur membaik dibandingkan kondisi harga di tahun-tahun sebelumnya yang naik karena adanya pandemi Covid-19.

Pada tahun 2023, Konsumsi LNPRT memiliki indeks implisit yang meningkat cukup tinggi. Hal ini diduga akibat ada kegiatan persiapan dan pra Pemilihan Umum yang mempengaruhi aktivitas ekonomi termasuk di Provinsi Papua Barat.

### 3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi kedua terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran Papua Barat. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana lebih dari seperlima produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 3.2.1. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat, 2019—2023**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (miliar rupiah)					
a. ADHB	24.567,13	24.656,13	26.052,28	27.794,79	13.050,04
b..ADHK 2010	16.826,38	16.639,20	17.087,31	17.709,23	8.470,24
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	29,12	29,50	30,62	30,45	21,19
Rata-rata konsumsi per kapita/ tahun (ribu rupiah)					
a. ADHB	25.494,81.	21.741,32	22.666,51.	23.788,32.	22.912,09
b. ADHK 2010	17.461,76.	14.672,14.	14.866,63.	15.156,54.	14.871,29
Pertumbuhan.(persen)					
a. Total Konsumsi RT	4,81	-1,11	2,69	3,64	2,68
b. Per Kapita	2,39	-15,98	1,33	1,95	1,02
Jumlah Penduduk (jiwa)	963.613	1.134.068	1.149.373	1.168.422	569.570

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \*= Angka Sementara \*\*= Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Tabel 6. menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2019 – 2022 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pada tahun 2023, terdapat pemekaran wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat tercatat berkurang hampir separuh dibandingkan kondisi di tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan nilai konsumsi akhir rumah tangga nominal (adh Berlaku) dan riil (adh Konstan) juga mengalami penurunan.



Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2019 - 2023 cukup stabil. Pada tahun 2020 dan 2021 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga bahkan mengalami peningkatan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Proporsi tertinggi dalam periode 5 tahun terakhir tercatat pada tahun 2021, mencapai 30,81 persen, dan terendah pada tahun 2023, sebesar 21,19 persen, kondisi Provinsi Papua Barat telah mengalami perubahan cakupan wilayah pasca pembentukan DOB provinsi.

Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita menurut adh Berlaku maupun adh Konstan 2010 cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kecuali di tahun 2020 dan 2023. Pada tahun 2023, secara rata-rata per kapita di Papua Barat menghabiskan dana sekitar 22.912,09 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan sebagainya). Sementara itu, rata-rata konsumsi per kapita menurut adh Konstan 2010 juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan adh Berlaku. Rata-rata konsumsi selalu meningkat dalam periode 5 tahun terakhir, kecuali di tahun 2020 dan 2023.

Perkembangan konsumsi rumah tangga juga dapat dilihat melalui laju pertumbuhannya. Sepanjang tahun 2019 hingga 2023, rata-rata konsumsi per kapita memiliki pertumbuhan positif. Pada tahun 2020 terdapat kejadian luar biasa yaitu Pandemi COVID-19 yang menyebabkan rata-rata - konsumsi rumah tangga berkontraksi cukup dalam mencapai 1,11 persen, tetapi tumbuh kembali di tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum dilanda pandemi, rata-rata konsumsi penduduk di Provinsi Papua Barat meningkat dari tahun ke tahun, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Selain itu perkembangan teknologi saat ini semakin memudahkan masyarakat untuk membeli barang secara *online*. Hal ini dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya dengan harga yang terkadang lebih murah daripada barang di pasar domestik, ataupun untuk mendapatkan barang yang tidak tersedia di pasar domestik.

**Tabel 3.2.2. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat, 2019—2023 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	54,71	55,60	55,73	56,27	56,22
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,88	1,83	1,75	1,74	1,95
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,63	11,27	12,05	11,95	12,97
d. Kesehatan & Pendidikan	5,28	6,07	6,42	5,94	5,70
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	18,61	16,74	15,68	15,80	14,17
f. Hotel & Restoran	4,09	3,79	3,74	3,73	4,56
g. Lainnya	4,80	4,71	4,62	4,57	4,44
<b>Total Konsumsi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Secara umum pada periode tahun 2019 – 2023, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Papua Barat, konsumsi makanan, minuman, dan rokok sedikit lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan berada pada kisaran 54 – 56 persen. Proporsi untuk makanan, minuman, dan rokok pada masing-masing tahun mencapai 54,71 persen (2019); 55,60 persen (2020); 55,73 persen (2021); 56,27 persen (2022); dan 56,22 persen (2023).

Bila ditilik lebih jauh mengenai konsumsi bukan makanan didominasi oleh konsumsi untuk kebutuhan Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya. Konsumsi untuk komponen tersebut berada pada kisaran 14 hingga 18 persen sepanjang tahun 2019 hingga 2023. Konsumsi bukan makanan juga didominasi untuk Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga yang berkisar antara 10 hingga 12 persen di tiap tahunnya.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Meskipun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

**Tabel 3.2.3. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat, 2019 - 2023 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,83	0,86	1,66	4,77	3,04
b. Pakaian dan Alas Kaki	11,34	-1,16	1,21	4,09	3,45
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,31	4,98	8,65	1,94	1,26
d. Kesehatan & Pendidikan	-0,66	9,79	8,02	-0,76	1,05
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,33	-9,08	0,79	4,09	2,85
f. Hotel & Restoran	2,28	-9,85	3,32	5,61	5,87
g. Lainnya	-7,01	-5,99	1,04	-1,15	0,79

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, kelompok konsumsi pada pengeluaran rumah tangga di Papua Barat hampir selalu mengalami pertumbuhan positif dalam periode 2019 hingga 2023, kecuali pada tahun 2020 dan 2022. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 pertama kali merebak dan menahan kinerja perekonomian Provinsi Papua Barat sehingga beberapa kelompok konsumsi berkontraksi akibat adanya pembatasan sosial. Sementara itu, pada tahun 2022 merupakan masa-masa akhir pandemi tersebut, ditandai dengan menurunnya konsumsi kelompok barang dan jasa seperti Kesehatan dan Pendidikan dan Lainnya yang sebelumnya dikonsumsi cukup intensif di masa pandemi berlangsung.

Pertumbuhan untuk kelompok makanan, minuman, dan rokok berkisar antara 0,86 persen (2020) hingga 5,83 persen (2019). Sementara itu, kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga mengalami pertumbuhan dengan kisaran antara 1,94 persen (2022) hingga 8,65 persen (2021). Sepanjang 5 tahun terakhir, hanya dua kelompok konsumsi ini yang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun.

Pada kelompok konsumsi bukan makanan, pola pertumbuhan juga cukup fluktuatif, di mana tahun 2019 secara umum terjadi pertumbuhan lebih tinggi dibanding tahun-tahun lainnya, di mana dari 7 kelompok konsumsi, 5 diantaranya mengalami pertumbuhan di atas 4 persen. Sementara itu, pada tahun 2023, konsumsi rumah tangga Provinsi Papua Barat tercatat tumbuh positif di seluruh kelompok barang dan jasa.

Indeks implisit menunjukkan peningkatan harga yang dihitung menggunakan referensi tahun dasar 2010. Secara sederhana, hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan harga tersebut dihasilkan dengan membandingkan tingkat harga suatu kelompok konsumsi pada tahun tertentu terhadap tingkat harga kelompok konsumsi yang sama pada tahun 2010. Nilai pertumbuhan implisit yang positif memperlihatkan terdapat kenaikan harga dibandingkan kondisi pada tahun dasar. Sebaliknya, pertumbuhan implisit yang negatif menunjukkan terdapat penurunan harga dibandingkan kondisi pada tahun dasar.

**Tabel 3.2.4. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat, 2019 - 2023 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,38	1,13	4,19	2,82	3,87
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,17	-0,93	-0,44	1,86	3,73
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,72	1,30	3,99	3,80	1,93
d. Kesehatan & Pendidikan	4,60	5,09	3,43	-0,65	5,28
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,51	-0,73	-1,77	3,29	2,11
f. Hotel & Restoran	3,98	3,01	1,09	0,79	5,79
g. Lainnya	3,45	4,74	2,75	6,64	3,86
<b>Total Konsumsi</b>	<b>4,11</b>	<b>1,49</b>	<b>2,89</b>	<b>2,94</b>	<b>3,53</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \*= Angka Sementara \*\*= Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Pertumbuhan implisit negatif terjadi pada tahun 2020 dan 2021 pada dua komponen yaitu Pakaian dan Alas Kaki dan Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya. Pada tahun 2022, pertumbuhan implisit negatif juga terjadi pada kelompok konsumsi Kesehatan dan Pendidikan.

Di sisi lain, sepanjang tahun 2019 -2023, kelompok konsumsi Makanan, Minuman, dan Rokok memiliki pertumbuhan implisit yang positif. Adapun rincian harga pada kelompok makanan, minuman, dan rokok mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 4,38 persen kemudian pada tahun 2020 melambat menjadi 1,13 persen. Lalu terjadi kenaikan kembali yang signifikan ditahun 2021 menjadi 4,19 persen dan terjadi perlambatan kembali pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 2,82 dan 3,87 persen.

### 3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA (LNPRT)

Peran konsumsi akhir LNPRT terhadap PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

**Tabel 3.3.1. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Papua Barat, 2019—2023**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT (miliar rupiah)					
a. ADHB	882,99	843,34	836,21	894,82	582,61
b. ADHK 2010	592,40	546,31	529,82	547,44	339,93
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,05	1,01	0,98	0,98	0,95
Pertumbuhan (persen)	10,37	-7,78	-3,02	3,32	9,09

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Selama periode 2019 – 2023, nilai konsumsi LNPRT baik adh Berlaku maupun adh Konstan mengalami fluktuasi. Tidak hanya itu, proporsi terhadap PDRB juga terjadi fluktuasi. Proporsi terbesar hanya sebesar 1,05 persen yang terjadi pada tahun 2019. Tahun 2021 hingga 2023 proporsi konsumsi LNPRT terhadap total PDRB Provinsi Papua Barat selalu di bawah 1 persen.

### 3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Pemerintah merupakan salah satu pelaku dalam perekonomian yang memiliki peran cukup unik. Pemerintah berfungsi sebagai penentu kebijakan yang mengatur jalannya perekonomian suatu wilayah, tetapi di sisi lain, pemerintah juga menjadi pelaku aktif dalam perekonomian itu sendiri. Adapun peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Provinsi Papua Barat serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

**Tabel 3.4.1. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Papua Barat, 2019 – 2023**

Komponen.Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total Konsumsi Pemerintah (miliar rupiah)</b>					
a. ADHB	17.256,06	16.704,53	16.223,26	16.619,29	10.383,85
b. ADHK 2010	9.715,19	9.267,16	8.904,69	9.003,96	5.743,29
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	20,46	19,98	19,07	18,20	16,86
<b>Konsumsi Pemerintah per kapita/ tahun (ribu rupiah)</b>					
a. ADHB	17.907,67	14.729,74	14.114,88	14.223,71	18.231,03
b. ADHK 2010	10.082,05	8.171,61	7.747,43	7.706,09	10.083,55
<b>Pertumbuhan (persen)</b>					
a. Total Konsumsi Pemerintah	3,42	-4,61	-3,91	1,11	13,88
b. Per Kapita	1,04	-18,95	-5,19	-0,53	12,03
Jumlah Penduduk (jiwa)	963.613	1.134.068	1.149.373	1.168.422	578.696

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \*= Angka Sementara \*\*= Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Secara umum, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan kestabilan level baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2019, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 17.256,06 miliar rupiah, kemudian menurun terus hingga pada tahun 2021 nilainya mencapai 16.223,26 miliar rupiah dan meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar 16.619,29 miliar rupiah. Pada tahun 2023 konsumsi pemerintah tercatat menurun. Hal ini diakibatkan adanya pemekaran wilayah DOB yaitu Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Setelah DOB terbentuk, konsumsi pemerintah Provinsi Papua Barat mencapai 10.383,85 miliar rupiah.

Memiliki pola senada dengan adh Berlaku, konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, juga mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020, 2021 dan 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konsumsi pemerintah di Provinsi Papua Barat tidak mengalami perubahan tingkat harga barang dan jasa yang dikonsumsi yang fluktuatif secara signifikan. Naik turunnya konsumsi pemerintah utamanya dikarenakan adanya perubahan volume barang dan jasa yang dikonsumsi.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Konsumsi pemerintah per kapita dapat menjadi indikator seberapa besar realisasi anggaran pemerintah yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan penduduk Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2023, konsumsi pemerintah per kapita mencapai 18.231,03 ribu rupiah selama setahun.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata per penduduk. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pada tahun 2023, pertumbuhan konsumsi pemerintah secara total mencapai 13,88 persen. Sementara itu, bila dilihat secara per kapita, pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 12,03 persen.

### 3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, gambaran dari berbagai produk barang dan jasa di suatu wilayah yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

**Tabel 3.5.1. Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Papua Barat, 2019 - 2023**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total Pembentukan Modal Tetap Bruto (miliar rupiah)</b>					
a. ADHB	18.366,13	18.219,84	18.895,97	17.576,12	8.932,08
b. ADHK 2010	11.816,23	11.302,85	11.223,39	10.256,51	5.339,82
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	21,77	21,80	22,21	19,25	14,51
<b>Struktur PMTB (miliar rupiah)</b>					
a. Bangunan	13.028,60	12.586,60	12.461,11	12.270,55	5.742,01
(%)	70,94	69,08	65,95	69,81	64,29
b. Non Bangunan	5.337,53	5.633,24	6.434,86	5.305,58	3.190,08
(%)	29,06	30,92	34,05	30,19	35,71
c. Total PMTB	18.366,13	18.219,84	18.895,97	17.576,12	8.932,08
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Nilai PMTB menunjukkan fluktuatif dari tahun ke tahun secara nominal. Nilai PMTB nominal paling kecil sebesar 8.932,08 miliar rupiah pada tahun 2023 dan nominal paling besar yaitu 18.895,97 miliar rupiah pada tahun 2021. Senada dengan hal tersebut, fluktuasi juga terjadi pada nilai PMTB riil. Nilai PMTB secara riil paling kecil sebesar 5.339,82 miliar rupiah pada tahun 2023 dan paling besar yaitu 11.816,23 miliar rupiah pada tahun 2019. Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Subkomponen bangunan merupakan subkomponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap yaitu diatas 60 persen. Pertumbuhan PMTB Bangunan terbilang sangat fluktuatif pada periode 2019 hingga 2023.

Proporsi nonbangunan terhadap total PMTB relatif stabil selama periode 2019-2023, yaitu berkisar pada 29 hingga 35 persen. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu 35,71 persen.

### **3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI**

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan.

Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).



**Tabel 3.6.1. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Papua Barat, 2019 - 2023**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Perubahan Inventori (miliar rupiah)					
a. ADHB	911,12	-294,57	-1 184,15	-1 529,49	762,14
b. ADHK 2010	762,03	-250,54	-1 393,34	-421,27	589,51
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,08	-0,35	-1,39	-1,68	1,24

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Pada tahun 2019 perubahan inventori tercatat sebesar 911,12 miliar rupiah dengan porsi terhadap PDRB sebesar 1,08 persen. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022 perubahan inventori bernilai negatif, hingga pada tahun 2022 sebesar -1.529,49 miliar rupiah. Pada tahun 2023, perubahan inventori bertanda positif, yakni sebesar 762,14 miliar rupiah.

### 3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR BARANG DAN JASA

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

**Tabel 3.7.1. Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat, 2019—2023**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Net Ekspor Barang dan Jasa (miliar rupiah)					
a. ADHB	22.373,53	23.459,36	24.254,91	29.936,48	27.860,66
b. ADHK 2010	22.362,28	24.099,14	24.937,53	25.422,66	20.472,07
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	26,52	28,07	28,51	32,79	45,25


Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya





**BAB IV**  
**PERKEMBANGAN AGREGAT**  
**PDRB MENURUT PENGELUARAN**  
**PROVINSI PAPUA BARAT**  
**TAHUN 2019-2023**

<https://papuabarat.bps.go.id>



#### 4. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 - 2023

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

##### 4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

**Tabel 4.1.1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Papua Barat, 2019 - 2023**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (miliar rupiah)					
a. ADHB	84.356,97	83.588,64	85.078,49	91.292,02	61.571,37
b. ADHK 2010	62.074,52	61.604,13	61.289,40	62.518,53	40.954,86
PDRB per kapita (ribu rupiah)					
a. ADHB	87.542,37	73.706,90	74.021,65	78.132,75	108.101,50
b. ADHK 2010	64.418,52	54.321,37	53.324,20	53.506,80	71.904,88
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 (persen)	0,29	-15,67	-1,84	0,34	3,47
Perkembangan Penduduk					
Jumlah Penduduk (jiwa)	963.613	1.134.068	1.149.373.	1.168.422..	569.570..
Pertumbuhan Penduduk (persen)	2,36	17,69	1,35	1,66	1,65

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

PDRB Perkapita Provinsi Papua Barat menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa setiap penduduk Papua Barat rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per kapita ditiap tahun tersebut.

Pertumbuhan per kapita secara "riil" dalam 5 tahun terakhir bernilai positif kecuali pada tahun 2020 dan 2021 diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian Papua Barat secara total mengalami kontraksi. Di akhir tahun 2022, Provinsi Papua Barat mengalami pemekaran menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Dengan komposisi wilayah baru yang hanya terdiri dari 6 (enam) kabupaten, Provinsi Papua Barat memiliki PDRB per Kapita per tahun mencapai 108,10 juta di tahun 2023.

#### 4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi sekitar 21 hingga 30 persen terhadap PDRB Papua Barat, yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Papua Barat sebanyak 21 hingga 30 persen digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Meskipun di dalam konsumsi akhir rumah tangga tersebut termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

**Tabel 4.2.1. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Barang dan Jasa, 2019—2023**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga ADHB (miliar rupiah)	24.567,13	24.656,13	26.052,28	27.794,79	13.050,04
Total Ekspor Barang dan Jasa ADHB (miliar rupiah)	50.328,16	44.197,30	42.594,14	53.179,43	55.838,84
<b>Perbandingan Konsumsi Rumah tangga terhadap Ekspor Barang dan Jasa</b>	<b>0,49</b>	<b>0,56</b>	<b>0,61</b>	<b>0,52</b>	<b>0,23</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar 0,49 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan ekspor. Rasio ini berada di atas 0,50 hingga tahun 2022, tetapi bernilai 0,23 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa setelah mengalami pemekaran, penyediaan (*supply*) di Provinsi Papua Barat semakin terserap untuk memenuhi kebutuhan ekspor daripada konsumsi rumah tangga.

### 4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 4.3.1. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB , 2019 — 2023**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga ADHB (miliar rupiah)	24 567,13	24 656,13	26 052,28	27 794,79	13 050,04
Total PMTB ADHB (miliar rupiah)	18 366,13	18 219,84	18 895,97	17 576,12	8 932,08
<b>Perbandingan Konsumsi Rumah tangga terhadap PMTB</b>	<b>1,34</b>	<b>1,35</b>	<b>1,38</b>	<b>1,58</b>	<b>1,46</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Rasio antara konsumsi rumah tangga terhadap PMTB pada periode 2019-2023 berkisar pada angka 1,34 hingga 1,58. Nilai yang lebih dari satu menunjukkan bahwa penggunaan PDRB untuk konsumsi rumah tangga selalu lebih besar dibandingkan penggunaan untuk PMTB. Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB mengalami fluktuasi dalam periode 2019 hingga 2023. Rasio bernilai sebesar 1,34 di tahun 2019 meningkat menjadi 1,35 pada tahun 2020, 1,38 pada tahun 2021, dan 1,58 pada tahun 2022. Setelah itu, rasio tersebut turun menjadi 1,46 persen pada tahun 2023.

### 4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Barang dan jasa yang berada di wilayah domestik yang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir selalu meningkat nilainya setiap tahun. Dengan peningkatan nilai tersebut, proporsinya terhadap PDRB juga cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, setelah Provinsi Papua Barat dimekarkan, proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB tercatat menurun hingga 0,39. Hal ini mengindikasikan produk yang digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir memiliki peranan yang berkurang.

**Tabel 4.4.1. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Papua Barat, 2019—2023**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADHB (miliar rupiah)					
a. Rumah Tangga	24.567,13	24.656,13	26.052,28	27.794,79	13.050,04
b. LNPRT	882,99	843,34	836,21	894,82	582,61
c. Pemerintah	17.256,06	16.704,53	16.223,26	16.619,29	10.383,85
<b>Jumlah</b>	<b>42.706,18</b>	<b>42.204,00</b>	<b>43.111,75</b>	<b>45.308,90</b>	<b>24.016,50</b>
PDRB ADHB (miliar rupiah)	84 356,97	83.588,64	85.078,49	91.292,02	61.571,37
<b>Proporsi</b>	<b>0,51</b>	<b>0,50</b>	<b>0,51</b>	<b>0,50</b>	<b>0,39</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

#### 4.5 PERBANDINGAN EKSPOR BARANG DAN JASA TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar daerah. Sementara PMTB menunjukkan produk yang menjadi aset tetap atau investasi di daerah. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

**Tabel 4.5.1 Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2019 - 2023**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor Barang dan Jasa ADHB (miliar rupiah)	50 328,16	44.197,30	42.594,14	53.179,43	55.838,84
Total PMTB ADHB (miliar rupiah)	18.366,13	18.219,84	18.895,97	17.576,12	8.932,08
<b>Perbandingan Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PMTB</b>	<b>2,74</b>	<b>2,43</b>	<b>2,25</b>	<b>3,03</b>	<b>6,25</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Selama tahun 2019 – 2022 ekspor barang dan jasa mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB, bahkan sempat mencapai lebih dari 3 kali lipat pada tahun 2022. Pada tahun 2023, setelah pemekaran provinsi, rasio bahkan menunjukkan nilai ekspor Papua Barat mencapai lebih 6 kali lipat dari nilai PMTB yang terbentuk.

#### 4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR BARANG DAN JASA

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor baik dari luar negeri maupun luar provinsi di dalam negeri. Interpretasi dari rasio ini adalah ketika rasio bernilai kecil, berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.



**Tabel 4.6.1. Rasio PDRB terhadap Impor Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PDRB ADHB (miliar rupiah)	84 356,97	83 588,64	85 078,49	91 292,02	61 571,37
Total Impor Barang dan Jasa ADHB (miliar rupiah)	27 954,62	20 737,94	18 339,23	23 242,96	27 978,18
<b>Perbandingan PDRB terhadap Impor Barang dan Jasa</b>	<b>3,02</b>	<b>4,03</b>	<b>4,64</b>	<b>3,93</b>	<b>2,20</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2019 tercatat sebesar 3,02. Rasio kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 4,03. Pada tahun 2021 rasio PDRB terhadap impor naik kembali menjadi 4,64 yang ditengarai disebabkan oleh peningkatan PDRB dan di tahun 2022 kembali menurun sebesar 3,93. Pasca pemekaran wilayah, pada tahun 2023 rasio tercatat hanya sebesar 2,20. Nilai ini menunjukkan semakin kecilnya peran impor pada perekonomian Papua Barat.

#### 4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 4.7.1. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Papua Barat, 2019—2023**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total Penyediaan</b>					
a. PDRB ADHB (miliar rupiah)	84 356,97	83 588,64	85 078,42	91 291,75	61 571,37
(%)	75,11	80,12	82,27	79,71	68,76
b. Impor ADHB (miliar rupiah)	27 954,62	20 737,94	18 339,23	23 242,96	27 978,18
(%)	24,89	19,88	17,73	20,29	31,24
<b>Total Permintaan Akhir</b>					
Permintaan Akhir (miliar rupiah)	112 311,59	104 326,58	103 417,72	114 534,98	89 549,55
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar Provinsi Papua Barat, dengan rentang 17 sampai dengan 31 persen.

#### 4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar wilayah (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor barang dan jasa terhadap nilai impor barang dan jasa disebut sebagai "Net Ekspor". Apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Apabila perbandingan ekspor terhadap impor lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada ekspor.

**Tabel 4.8.1. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor Barang dan Jasa ADHB (miliar rupiah)	50.328,16	44.197,30	42.594,14	53.179,43	55.838,84
Total Impor Barang dan Jasa ADHB (miliar rupiah)	27.954,62	20.737,94	18.339,23	23.242,96	27.978,18
Net Ekspor Barang dan Jasa (X - M) ADHB (miliar rupiah)	22.373,53	23.459,36	24.254,91	29.936,48	27.860,66
<b>Perbandingan Ekspor Barang dan Jasa terhadap Impor Barang dan Jasa</b>	<b>1,80</b>	<b>2,13</b>	<b>2,32</b>	<b>2,29</b>	<b>2,00</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \*= Angka Sementara \*\*= Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

Pada tahun 2023, posisi perdagangan barang dan jasa provinsi Papua Barat menunjukkan nilai lebih dari 1. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Provinsi Papua Barat berada dalam posisi surplus.

#### 4.9 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi), dalam hal ini digambarkan parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Keterangan :

$I_t$  = PMTB tahun ke t

$Y_t$  = Output tahun ke t

$Y_{t-1}$  = Output tahun ke t-1

Data pada tabel 23 menunjukkan besaran ICOR mengalami fluktuasi dalam periode 5 tahun terakhir. Nilai ICOR sebesar 7,34 pada tahun 2019 turun menjadi -24,03 pada tahun 2020 dan -35,66 tahun 2021. Setelah itu nilai ICOR meningkat kembali menjadi 8,34 di tahun 2022 yang menjadi nilai ICOR terbesar selama periode 2019 - 2023. Pada tahun 2023, angka ICOR tercatat sebesar 2,65.

**Tabel 4.9.1. Incremental Capital Output Ratio Provinsi Papua Barat, 2019 – 2023**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)	62.074,52	61.604,13	61.289,40	62.518,53	40.954,86
Perubahan PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)	1.609,00	-470,39	-314,73	1.229,13	2.016,69
PMTB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	11.816,23	11.302,85	11.223,39	10.256,51	5.339,82
<b>ICOR</b>	<b>7,34</b>	<b>-24,03</b>	<b>-35,66</b>	<b>8,34</b>	<b>2,65</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

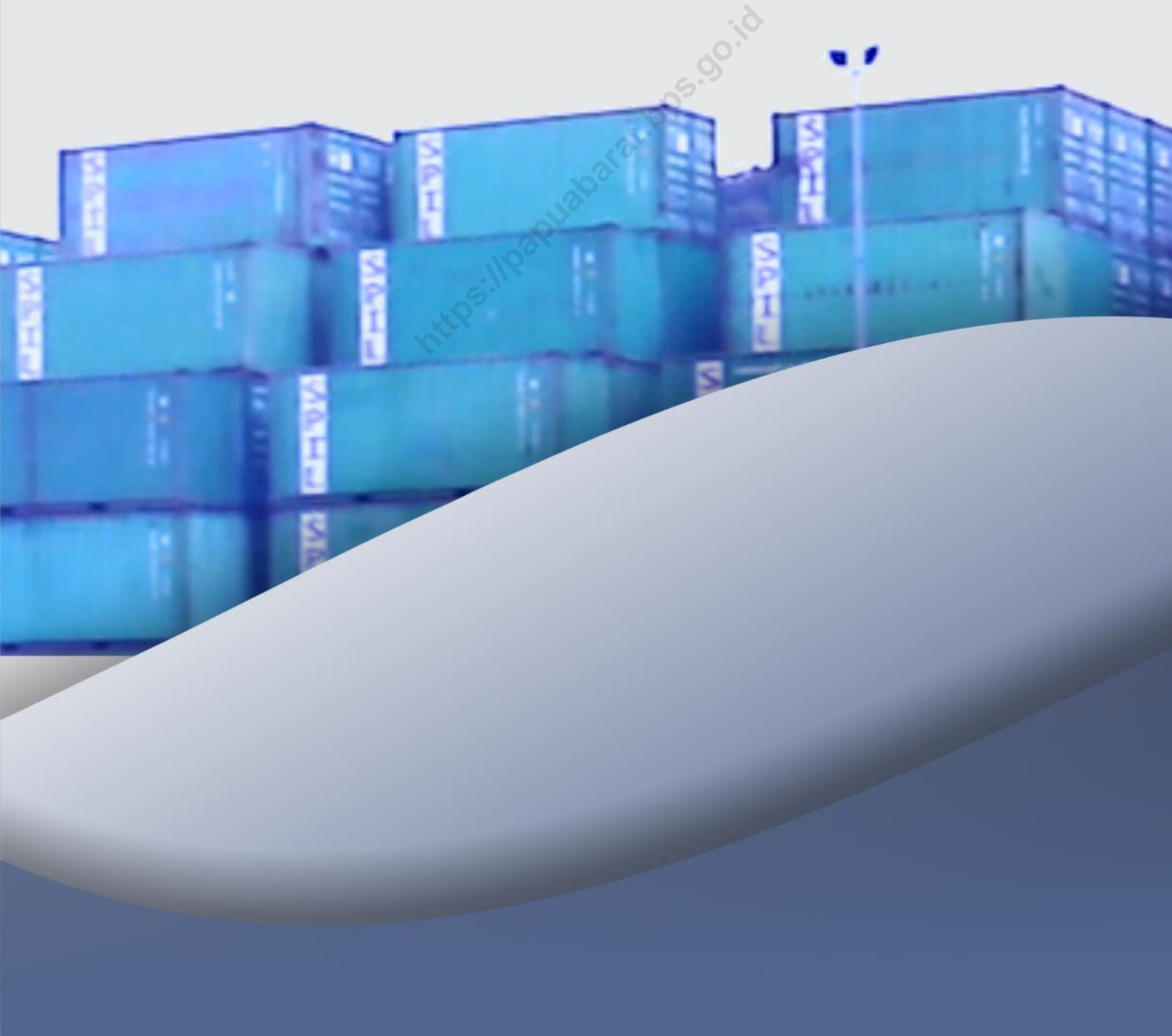
1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya



# BAB V

# PENUTUP





## 5. PENUTUP

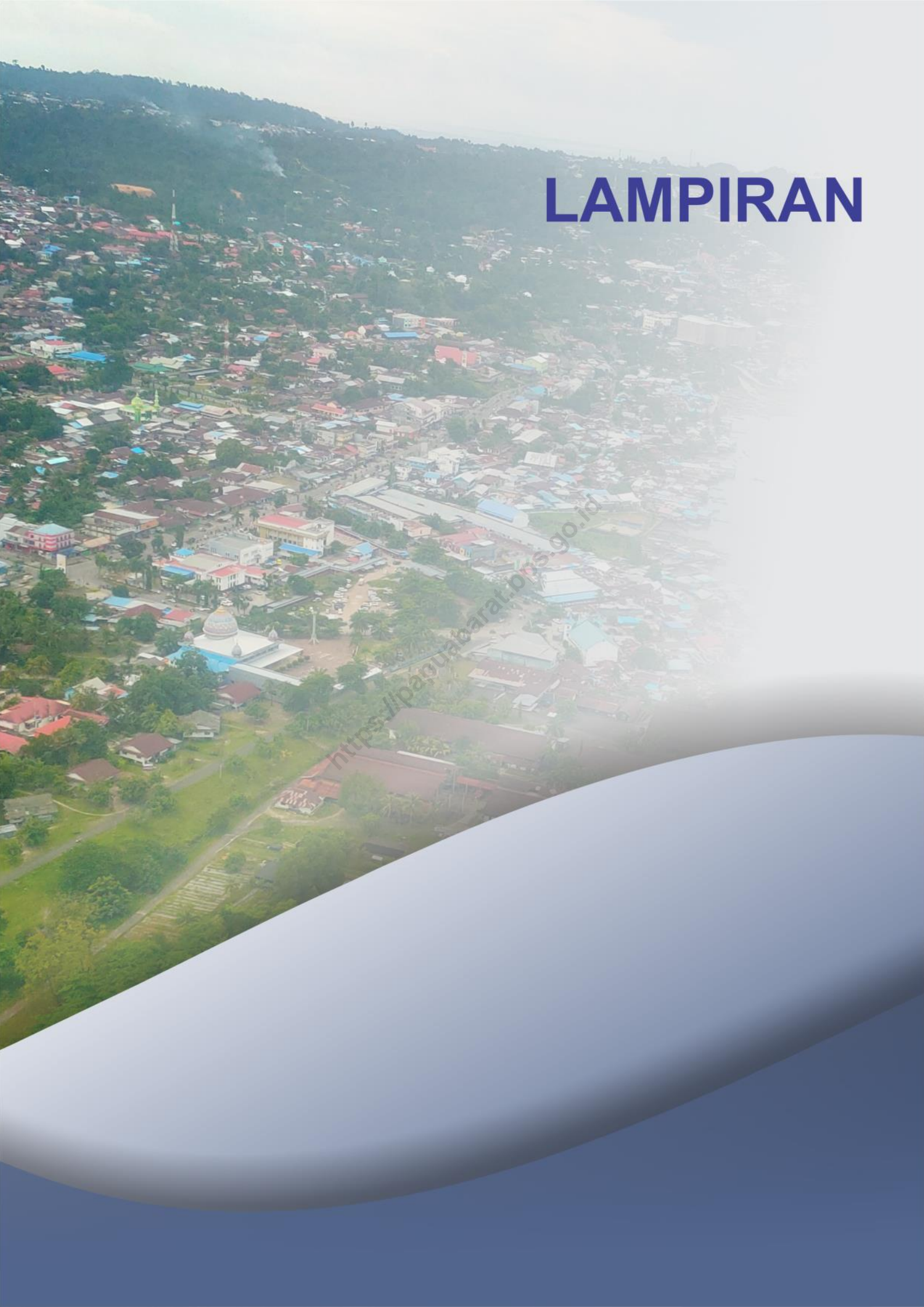
Kesimpulan dari pembahasan dalam publikasi ini sebagai berikut:

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Papua Barat pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPR), pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana mengenai perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2019 sampai dengan 2023, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Papua Barat terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

<https://papuabarat.bps.go.id>



# LAMPIRAN



<https://paguabarat.bps.go.id>



**Lampiran 1. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut  
Pengeluaran Papua Barat 2019 - 2023 (miliar rupiah)**

Komponen.Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	24.567,13.	24.656,13	26.052,28	27.794,79	13.050,04
2. Konsumsi LNPRT	882,99	843,34	836,21	894,82	582,61
3. Konsumsi Pemerintah	17.256,06.	16.704,53	16.223,26	16.619,29	10.383,85
4. PMTB	18.366,13.	18.219,84	18.895,97	17.576,12	8.932,08
5. Perubahan Inventori	911,12	-294,57	-1 184,15	-1 539,49	762,14
6. Ekspor Barang dan Jasa	50.328,16	44.197,30	42.594,14	53.179,43	55.838,84
7. Impor Barang dan Jasa	27.954,62	20.737,94	18.339,23	23.242,96	27.978,18
<b>PDRB</b>	<b>84.356,97</b>	<b>83.588,64</b>	<b>85.078,49</b>	<b>91.292,02</b>	<b>61.571,37</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

**Lampiran 2. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut  
Pengeluaran Papua Barat 2019 - 2023 (miliar rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	16.826,38	16.639,20	17.087,31	17.709,23	8.470,24
2. Konsumsi LNPRT	592,40	546,31	529,82	547,44	339,93
3. Konsumsi Pemerintah	9.715,19	9.267,16	8.904,69	9.003,96	5.743,29
4. PMTB	11.816,23	11.302,85	11.223,39	10.256,51	5.339,82
5. Perubahan Inventori	762,03	-250,54	-1 393,34	-421,27	589,51
6. Ekspor Barang dan Jasa	47.314,46	45.934,78	41.019,72	38.684,23	39.456,61
7. Impor Barang dan Jasa	24.952,18	21.835,64	16.082,19	13.261,57	18.984,54
<b>Total PDRB</b>	<b>62.074,52</b>	<b>61.604,13</b>	<b>61.289,40</b>	<b>62.518,53</b>	<b>40.954,86</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

### Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Papua Barat 2019 - 2023 (persen)

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	29,12	29,50	30,62	30,45	21,19
2. Konsumsi LNPRT	1,05	1,01	0,98	0,98	0,95
3. Konsumsi Pemerintah	20,46	19,98	19,07	18,20	16,86
4. PMTB	21,77	21,80	22,21	19,25	14,51
5. Perubahan Inventori	1,08	-0,35	-1,39	-1,68	1,24
6. Ekspor Barang dan Jasa	59,66	52,87	50,06	58,25	90,69
7. Impor Barang dan Jasa	33,14	24,81	21,56	25,46	45,44
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

### Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Papua Barat 2019 - 2023

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,81	-1,11	2,69	3,64	2,68
2. Konsumsi LNPRT	10,37	-7,78	-3,02	3,32	9,09
3. Konsumsi Pemerintah	3,42	-4,61	-3,91	1,11	13,88
4. PMTB	6,13	-4,34	-0,70	-8,61	-15,04
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	-4,39	-2,92	-10,70	-5,69	10,26
7. Impor Barang dan Jasa	-6,91	-12,49	-26,35	-17,54	6,07
<b>PDRB</b>	<b>2,66</b>	<b>-0,76</b>	<b>-0,51</b>	<b>2,01</b>	<b>5,18</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \* = Angka Sementara \*\* = Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

## Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Papua Barat 2019 - 2023

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	146,00	148,18	152,47	156,95	154,07
2. Konsumsi LNPRT	149,05	154,37	157,83	163,46	171,39
3. Konsumsi Pemerintah	177,62	180,26	182,19	184,58	180,80
4. PMTB	155,43	161,20	168,36	171,37	167,27
5. Perubahan Inventori	119,56	117,57	84,99	363,07	129,28
6. Ekspor Barang dan Jasa	106,37	96,22	103,84	137,47	141,52
7. Impor Barang dan Jasa	112,03	94,97	114,03	175,27	147,37
<b>PDRB</b>	<b>135,90</b>	<b>135,69</b>	<b>138,81</b>	<b>146,02</b>	<b>150,34</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \*= Angka Sementara \*\*= Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

## Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Papua Barat 2019 - 2023 (persen)

Komponen Pengeluaran	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>r,1</sup>	2022 <sup>*,1</sup>	2023 <sup>**,2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,11	1,49	2,89	2,94	3,53
2. Konsumsi LNPRT	2,57	3,57	2,24	3,57	6,41
3. Konsumsi Pemerintah	8,25	1,48	1,07	1,31	0,14
4. PMTB	6,58	3,71	4,45	1,78	0,34
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	-6,46	-9,54	7,92	32,39	-0,41
7. Impor Barang dan Jasa	-7,37	-15,23	20,07	53,70	-7,51
<b>PDRB</b>	<b>3,17</b>	<b>-0,15</b>	<b>2,31</b>	<b>5,19</b>	<b>3,89</b>

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain

Catatan : r= Angka diperbaiki \*= Angka Sementara \*\*= Angka sangat sementara

1 = Termasuk Provinsi Papua Barat Daya

2 = Tidak Termasuk Provinsi Papua Barat Daya





<https://papuabarat.bps.go.id>

## DAFTAR PUSTAKA





1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. \_\_\_\_\_, *Statistik Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. \_\_\_\_\_, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
4. \_\_\_\_\_, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
5. \_\_\_\_\_, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
6. \_\_\_\_\_, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
7. \_\_\_\_\_, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. \_\_\_\_\_, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
9. \_\_\_\_\_, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
10. \_\_\_\_\_, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
11. \_\_\_\_\_, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
12. \_\_\_\_\_, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
13. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
14. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
15. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
16. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
17. \_\_\_\_\_, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
18. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
19. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
20. \_\_\_\_\_, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
21. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
22. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://papuabarat.bps.go.id>

